



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I – KELAS UTAMA**

Jl. C.2 Gedung Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I – Kelas Utama
Seokarno-Hatta Banten 19110

Telepon : (021) 5591 2648, 5591 2649, 5591 2650
Fax : (021) 5591 2651
e-mail : otban.wil.1@dephub.go.id

Nomor : KU.207/7/V/KOBU.I/2026 Tangerang, 6 Mei 2026
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (Audited)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta IV

Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-86/PB/2026 tanggal 06 April 2026 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 (Audited), dengan hormat disampaikan Laporan Keuangan (Unaudited) Anggaran 2025 Satker Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

No.	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) Satker Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.	1 (satu) berkas	-

Sesuai dengan hal tersebut diatas, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menggunakan data neraca yang bersumber dari modul sakti dan monsakti yang telah direkonsiliasi secara internal pada masing-masing bagian khususnya pelaporan keuangan internal Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Putu Eka Cahyadi
NIP. 197904152002121001

LAPORAN KEUANGAN

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
TA. 2025 (Audited)



KANTOR OTORITAS BANDAR
UDARA WILAYAH I

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	
I . Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8-17
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18-25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26-44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	43-48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49-52
VI. Lampiran dan Daftar	
1. Pagu Anggaran / DIPA 2025 Revisi ke-19	
2. Hasil Rekonsiliasi Sakti – SPAN periode Januari s.d Desember 2025	
3. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA	
4. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Januari s.d Desember 2025	

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA

*JL. C2 GEDUNG OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA, SOEKARNO-HATTA BANTEN
TELEPON 021 55912648, 55912650, FAXIMILE 021 55912651*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun poin-poin pertanggungjawaban utama kami adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran

Sepanjang tahun 2025, Satker OBU Wilayah I telah merealisasikan belanja sebesar **Rp. 54.380.542.826** atau (66%) dari total pagu sebesar **Rp. 81.797.823.000**. Anggaran tersebut difokuskan pada pengawasan dan pengendalian, kelaikudaraan operasional bandar udara, serta keamanan penerbangan di wilayah kerja.

2. Capaian Pendapatan PNB

Kami telah menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp. 21.130.345.431** ke Kas Negara. Hal ini mencerminkan optimalisasi fungsi pengawasan dan pelayanan jasa kebandarudaraan yang melampaui/mencapai target yang ditetapkan.

3. Manajemen Aset (Barang Milik Negara).

Seluruh kegiatan aset tetap selama tahun 2025 telah dicatat dan diinventarisasi dengan baik dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Negara (SIMAK-BMN), guna mendukung operasional pengawasan penerbangan.

Tangerang, Mei 2026
Kepala Kantor



Putu Eka Cahyadi
NIP. 197904152002121001

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Tahun 2025 (*audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALIASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*audited*). Realisasi Pendapatan Negara Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 21.130.345.431,- telah mencapai 63,79% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 33,125,180,000,- Realisasi Belanja Negara sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 (*audited*) adalah sebesar Rp. 54,380,542,826,- atau mencapai 66% dari alokasi anggaran sebesar Rp 81,797,823,000;

Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 (*audited*) mencakup Pendaptan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (*audited*). Realisasi Pendapatan Rp Rp 21,756,311,943; telah mencapai 57,24% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 38.012.100.000,- Realisasi Belanja Negara sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 (*audited*) adalah sebesar Rp 68,796,044,619,- atau mencapai 97,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 70,600,273,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Ekuitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 (*audited*) Nilai Aset tersebut per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 30,885,881,918; yang terdiri dari: Aset Lancar Persediaan sebesar Rp 1,138,674,364; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 28,978,262,954; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 768,944,600; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 30,885,881,918; Sedangkan Posisi Neraca keuangan pada periode 31 Desember 2024 (*audited*) Nilai Aset tersebut per Desember 2024 disajikan sebesar Rp 36,100,255,528; yang terdiri dari Aset Lancar berupa

perseediaan sebesar Rp 1,797,525,298; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 31,926,200,555; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2,376,529,675; sedangkan nilai kewajiban jangka pendek berkisar Rp 1,861,554,175; dan Jumlah Ekuitas berkisar Rp 34,238,701,353; sehingga perbandingan persentasi yang terdapat di Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 14,44 persen.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan beberapa unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar. Pendapatan-LO hingga sampai Akhir Tahun 2025 (*audited*) adalah sebesar Rp 20,817,289,071 sedangkan jumlah dari kegiatan beban operasional sampai bulan Desember 2025 bekisar Rp 59,062,408,969; sehingga terdapat surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai Rp (38,245,119,898); Jumlah surplus/defisit pelepasan aset senilai Rp (78,515,094); pendapatan pelepasan aset Rp 296,237,000; sehingga terdapat beban pelepasan Aset Rp 374,752,094; Surplus/defisit-LO sebelum pos luar biasa Rp (38,323,634,992); yang terdiri dari Pos luar biasa Rp 0. Dan beban luar biasa Rp 0;

Sedangkan Laporan Operasional tahun Anggaran 2024 (*audited*) juga memiliki beberapa unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar. Pendapatan-LO hingga pada Tahun 2024 (*audited*) adalah sebesar Rp 21,755,117,943; sedangkan jumlah dari kegiatan beban operasional sampai Bulan Desember 2024 bekisar Rp 63,697,921,345; sehingga memiliki surplus/defisit dari kegiatan operasional (41,942,803,402); Jumlah surplus/defisit pelepasan aset senilai Rp (6,581,270); pendapatan pelepasan aset Rp 1,194,000; sedangkan beban pelepasan aset Rp 7,775,270; Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp (41,949,384,672); yang terdiri dari pos luar biasa Rp 0; dan beban luar biasa Rp 0;

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 (*audited*) Ekuitas Awal Rp. 34,238,701,353; dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (38,323,634,992) dikurangi dengan koreksi yang

menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp 1,720,618,162 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 33,250,197,395; sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*audited*) adalah senilai Rp 30,885,881,918;

Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun anggaran pelaporan 2024. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 (*audited*) ekuitas awal Rp 29,041,056,806; dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (41,949,384,672); dikurangi dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp 107,296,543; dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 47,039,732,676; sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*audited*) adalah senilai Rp 34,238,701,353;

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (*audited*) disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE 31 Desember 2025(Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited)

Dalam rupiah

URAIAN	Ctt	TA 2025 audited		% thd Anggaran	TA 2024 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Perpajakan	B.1				
PNBP	B.11	33.125.180.000	21,130,345,431	63,79%	21.756.311.943
Jumlah Pendapatan		33.125.180.000	21,130,345,431	63,79%	21.756.311.943
Belanja	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2.1	32.920.510.000	32.836.664.107	99,75%	28.305.327.579
Belanja Barang	B.2.2	40.074.397.000	21.543.878.719	53,76%	32.383.443.364
Belanja Bantuan Sosial					
Jumlah Belanja Sosial		72.994.907.000	54.380.542.826	74,50%	60.688.770.943
Belanja Modal	B.3				
Belanja Tanah	B.3.1				
Belanja Peralatan & Mesin	B.3.2	6.602.916.000	-	0%	3.433.789.050
Belanja Gedung & Bangunan	B.3.3	2.200.000.000	-	0%	4.673.484.626
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.3.4				
Belanja Modal Lainnya	B.3.5				
Jumlah Belanja Modal		8.802.916.000	-	0%	8.107.273.676
Jumlah Belanja		81.797.823.000	54.380.542.826	66,48%	68.796.044.619

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
Neraca
Periode 31 Desember 2025 (audited) dengan perbandingan
31 Desember 2024 (audited)

Audited dalam Rupiah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	31 Des 2025 (Audited)	31 Des 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5		
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	-	
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.10	-	
Persediaan	C.11	1.138.674.364	1.797.525.298
Jumlah Aset Lancar		1.138.674.364	1.797.525.298
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	-	-
Peralatan dan Mesin	C.17	106.113.677.725	123.529.952.802
Gedung dan Bangunan	C.18	25.413.266.767	23.860.398.777
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	2.108.385.500	2.112.785.500
Aset Tetap Lainnya	C.20	99.274.500	118.937.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.21		353.813.600
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.22		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.23	(104.756.341.538)	(118.049.687.124)
Jumlah Aset Tetap		28.978.262.954	31.926.200.555
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.24	13.284.959.466	5.027.333.289
Dana yang dibatasi pengerjaannya	C.25		
Aset tak berwujud dalam pengerjaan	C.26		1.861.554.175
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.27	(12.516.014.866)	(4.512.357.789)
Jumlah Aset Lainnya		768.944.600	2.376.529.675
JUMLAH ASET		30.885.881.918	36.100.255.528
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.28		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.29		1.861.554.175
Pendapatan Diterima di Muka	C.30		-
Utang yang belum ditagihkan	C.31		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	1.861.554.175
JUMLAH KEWAJIBAN		-	1.861.554.175
EKUITAS			
Ekuitas	C.32	30.885.881.918	34.238.701.353
JUMLAH EKUITAS		30.885.881.918	34.238.701.353
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		30.885.881.918	36.100.255.528

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
Laporan Operasional
Periode yang berakhir 31 Desember 2025 (audited) dengan Perbandingan 31
Desember 2024 (audited)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	Ctn	31 DESEMBER 2025 Audited	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	20.817.289.071	21.755.117.943
JUMLAH PENDAPATAN		20.817.289.071	21.755.117.943
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	32.836.664.107	28.305.327.579
Beban Persediaan	D.3	4.005.536.164	3.639.546.258
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.300.309.705	14.523.423.457
Beban Pemeliharaan	D.5	3.658.747.269	3.311.992.155
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.238.136.515	9.570.962.645
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan	D.9	4.023.015.209	4.346.669.251
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10		
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		59.062.408.969	63.697.921.345
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(38.245.119.898)	(41.942.803.402)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		(78.515.094)	(6.581.270)
Pendapatan Pelepasan Aset	D.12.2	296.237.000	1.194.000
Beban Pelepasan Aset	D.12.3	374.752.094	7.775.270
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(78.515.094)	(6.581.270)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(38.323.634.992)	(41.949.384.672)
POS LUAR BIASA	D.13		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(38.323.634.992)	(41.949.384.672)

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
Laporan Perubahan Ekuitas
Periode 31 Desember 2025 (audited) dan
31 Desember 2024 (audited)

Audited dalam Rupiah

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

URAIAN	CATATAN	Thn. 2025 (audited)	Thn. 2024 (audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	E.1	34.238.701.353	29.041.056.806	5.197.644.547	17.9
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(38.323.634.992)	(41.949.384.672)	3.625.749.680	(8.64)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	1.720.618.162	107.296.543	1.613.321.619	1,503.61
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-		
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		-		
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	1.720.618.162	107.296.543	1.613.321.619	1,503.61
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6		-		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	33.250.197.395	47.039.732.676	(13.789.535.281)	(29.31)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.352.819.435)	5.197.644.547	(8.550.463.982)	(164.51)
EKUITAS AKHIR	E.5	30.885.881.918	34.238.701.353	(3.352.819.435)	(9.79)

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

✓ Eksistensi dan Kedudukan Organisasi

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Secara struktural, institusi ini berada di bawah naungan serta bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Perhubungan melalui pembinaan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sebagai institusi yang mengemban amanah negara, organisasi tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama berpedoman kepada landasan hukum yang kuat, yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

✓ Tugas Pokok dan Fungsi Strategis

Dalam ekosistem penerbangan nasional Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama memegang peranan vital sebagai regulator dan pengawas lapangan. Tugas pokok instansi meliputi pelaksanaan pengaturan, pengendalian, serta pengawasan secara ketat terhadap seluruh kegiatan penerbangan di bandar udara guna menjamin aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat luas.

✓ Jangkauan Wilayah Kerja dan Operasional

Guna memastikan pengawasan yang efektif dan merata, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama memiliki sejumlah 10 (sepuluh) lokasi, yang terdiri atas, Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama sebanyak 1 (satu) lokasi, Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I sebanyak 4 (empat) lokasi, dan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II sebanyak 5 (lima) lokasi. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama merupakan Kantor

Bandar Udara Kelas Utama yang berkedudukan di Jl. C2 Gedung Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, Banten.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

✓ Esensi Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 (*audited*) ini merupakan representasi formal atas seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai posisi keuangan serta hasil operasi instansi selama satu periode akuntansi. Laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

✓ Metodologi dan Sistem Akuntansi

Dalam menghasilkan data yang akurat dan presisi, penyusunan laporan ini mengadopsi Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem ini mengintegrasikan rangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari tahap pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Komponen utama dari SAI ini meliputi dua pilar sinergis yang pertama Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), digunakan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sedangkan yang kedua Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) berperan penting dalam memproses informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya guna menyusun neraca serta laporan manajerial aset negara secara akrual.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (*audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan LO

Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) *Beban*

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) *Aset*

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya, yang akan dibahas dalam rincian aset Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah I Kelas Utama.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

Defenisi Aset Lancar/Persediaan adalah aset lancara dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya

bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah
2. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
3. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokument sumber sah dan atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

*Penyusutan
Aset Tetap*

diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

d. **Piutang Jangka Panjang**

Piutang
Jangka
Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lengkap Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 1	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas Merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Anggaran 2025 *audited*, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama sepanjang tahun anggaran 2025 satuan kerja tersebut mengalami revisi DIPA sebanyak sembilan belas kali alokasi awal (DIPA Induk) ditetapkan sebesar Rp 72,725,529,000 namun, pada revisi DIPA terakhir total alokasi anggaran meningkat menjadi Rp 81,797,823,000, terdapat kenaikan net sebesar Rp. 9,072,294,000 atau 12,47 persen dibandingkan pagu awal. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh diterimanya tambahan dana, tambahan ini dialokasikan pada Pos Belanja Pegawai, Belanja Barang Sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut:

Uraian	30-Dec-25	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan dari pemanfaatan BMN		
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp 60.580.000	Rp 60.580.000
Pendapatan Penujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	Rp -	Rp -
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	Rp 32.669.600.000	Rp 32.669.600.000
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	Rp 395.000.000	Rp 395.000.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	Rp 33.125.180.000	Rp 33.125.180.000
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 26.648.216.000,00	Rp 32.920.510.000,00
Belanja Barang	Rp 37.274.397.000,00	Rp 40.074.397.000,00
Belanja Modal	Rp 8.802.916.000,00	Rp 8.802.916.000,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	72.725.529.000	81.797.823.000

Kenaikan neto sebesar Rp. 9,072,294,000 dari pagu awal ini merupakan dampak dari diterimanya dana alokasi sepanjang tahun berjalan. Tambahan tersebut spesifik didistribusikan pada dua pos utama yaitu pada belanja pegawai guna untuk memenuhi kebutuhan baik dari segi penambahan pegawai baru maupun pindahan sehingga tunjangan dan gaji menjadi berubah setelah adanya perubahan jumlah pegawai. Sedangkan belanja barang guna mendukung optimalisasi operasional kantor.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 21,130,345,431. atau mencapai 63,79% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp33,125,180,000;

Realisasi
Pendapatan Rp
21,130,345,431

Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama terdiri dari Pendapatan PNBP Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan

Uraian		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin		296.237.000	0%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	60.580.000	169.259.636	279%
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan mesin		1.000.000	0%
429513	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		16.819.360	
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		1.105.643	
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan		10.713.792	0%
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	32.669.600.000	20.019.310.000	61%
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	395.000.000	615.900.000	156%
Jumlah		33.125.180.000	21.130.345.431	63,79

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan penompang pembiayaan nasional. Realisasi PNBP Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama periode Tahun Anggaran 2025 (*audited*) sebesar Rp 21,130,345,431 dari perkiraan estimasi Rp 33,125,180,000; Sehingga persentasi pendapatan berkisar 63,79%.

Berikut ini rincian realisasi pendapatan PNBP Tahun Anggaran periode 2024 s.d 2025 (*audited*) perbandingan pendapatan yang melampaui estimasi seperti di bawah ini:

- Sewa Tanah Gedung dan Bangunan (Akun 4255131) mencatatkan performa sangat signifikan dengan realisasi mencapai 279%. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan aset yang sangat efektif.
- Jasa Transportasi Lainnya (Akun 425516) terealisasi sebesar 156% dari target yang mencerminkan peningkatan aktivitas layanan transportasi di wilayah kerja.
- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan (Akun 425516) sebagai penyumbang terbesar, akun ini terealisasi sebesar Rp. 20,019,310,000 atau 61% dari target. Meskipun merupakan penompang utama pendapatan, terdapat selisih antara estimasi dan realisasi yang dipengaruhi oleh dinamika trafik penerbangan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 (*audited*)
dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP Lainnya	Rp 21.130.345.431	Rp 21.756.311.943	97%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin	Rp 296.237.000		0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 169.259.636	Rp 116.132.943	146%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 1.000.000	Rp 1.194.000	84%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 16.819.360		0%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 1.105.643		0%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	Rp 10.713.792		0%
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	Rp 20.019.310.000	Rp 20.779.235.000	96%
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	Rp 615.900.000	Rp 859.750.000	72%
Jumlah	Rp 21.130.345.431	Rp 21.756.311.943	97%

Realisasi Pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2025 (*audited*) berkisar Rp 21,130,345,431 dan Realisasi Pendapatan PNBP Tahun Anggaran 2024 (*audited*) berkisar Rp 21,756,311,943 sehingga terdapat perbandingan berkisar 97 persen. Penurunan tersebut pada kegiatan pendapatan jasa transportasi lainnya yang menurun berkisar 72% dan pendapatan jasa kebandarudaraan berkisar 96%. Sehingga memiliki penurunan nilai pendapatan.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Rp
54,380,542,826

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp 54,380,542,826; atau 66,48% dari anggaran belanja sebesar Rp 81,797,823,000; Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2025

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	32.920.510.000	32.836.664.107	100%
Belanja Barang	40.074.397.000	21.543.878.719	54%
Belanja Modal	8.802.916.000		
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	81.797.823.000	54.380.542.826	66%
Pengembalian			
Jumlah	81.797.823.000	54.380.542.826	66%



Memiliki perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 (*audited*), realisasi Belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2024 (*audited*) mengalami Penurunan sebesar 21% disebabkan oleh beberapa faktor antar lain yaitu:

- Tidak terlaksananya belanja modal yang pada awal anggaran memiliki berkisar 8M, nilai tidak terealisasi disebabkan oleh efisiensi anggaran dasar.
- Belanja barang memiliki penurunan -33% ini karena terjadinya efisiensi yang sama, sehingga belanja keperluan kantor dan perjalanan serta kegiatan yang ada di berjalan maksimal, seperti tahun 2024 yang nilai realisasinya cukup baik ketimbang realisasi pada tahun 2025.

Uraian	REALISASI 31 Desember TA 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	32.836.664.107	28.305.327.579	16%
Belanja Barang	21.543.878.719	32.383.443.364	-33%
Belanja Modal		8.107.273.676	-100%
Jumlah	54.380.542.826	68.796.044.619	-21%

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 32,836,664,107 dan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2024 sebesar Rp 28,305,327,579; ada pun peningkatan yang terjadi mengenai belanja pegawai pada tahun 2025 secara umum disebabkan oleh upaya peningkatan kesejahteraan ASN (PNS dan PPPK).

Penyebab kenaikan belanja pegawai 2025 sebagai berikut:

1. Kenaikan Gaji ASN (PNS dan PPPK) Berdasarkan Perpres No. 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja.

Realisasi Belanja
Pegawai Rp
32,836,664,107

2. Rekrutmen CPNS dan PPPK Penerimaan Pegawai Baru (CPNS dan PPPK yang intensif meningkatkan jumlah penerimaan gaji dan tunjangan.
3. Kenaikan tunjangan tunjangan di beberapa pegawai.
4. Kenaikan gaji berkala, selain kenaikan gaji pokok secara nasional, kenaikan gaji berkala yang didasarkan pada masa kerja pegawai.

Perbandingan belanja pegawai 31 Desember 2025 (*audited*) dan 31 Desember 2024 (*audited*)

URAIAN	REALISASI 31 Dsemer 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	9.116.512.580	8.782.554.940	3,80
Belanja Pembulatan Gaji PNS	128.358	126.742	1,28
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	614.648.100	607.413.510	1,19
Belanja Tunj. Anak PNS	201.402.692	204.469.396	(1,50)
Belanja Tunj. Struktural PNS	176.000.000	167.310.000	5,19
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.150.000		
Belanja Tunj. PPh PNS	60.061.699	50.934.808	17,92
Belanja Tunj. Beras PNS	490.355.820	495.135.540	(0,97)
Belanja Uang Makan PNS	1.327.213.000	1.119.479.000	18,56
Belanja Tunj. Umum PNS	433.355.000	431.885.000	0,34
Belanja Lembur	1.098.948.000	1.019.987.000	7,74
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	17.067.593.644	15.175.880.346	12,47
Jumlah Belanja Kotor	30.589.368.893	28.055.176.282	9,03
Pengembalian Pembulatan Gaji PNS	941	2.108	(55,36)
Pengembalian Tunj. Suami/Istri PNS		-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	30.589.367.952	28.055.174.174	9,03

Perbandingan belanja pegawai PPPK 31 Desember 2025 (*audited*) dan 31 Desember 2024 (*audited*)

URAIAN	REALISASI 31 Dsemer 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PPPK	736.311.900	82.359.600	8,94
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.995	1.069	10,29
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	44.907.480	8.235.960	5,45
Belanja Tunjangan Anak PPPK	12.249.654	1.647.192	7,44
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000	5.400.000	0,93
Belanja Tunjangan Beras PPPK	45.841.860	5.866.020	7,81
Belanja Uang Makan PPPK	169.292.000	13.579.000	12,47
Belanja Tunjangan Umum PPPK	39.690.000		
Belanja Uang Lembur PPPK	254.192.000	17.444.000	14,57
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	939.759.325	115.618.456	8,13
Jumlah Belanja Kotor	2.247.295.214	250.151.297	8,98
Pengembalian Pembulatan Gaji PPPK		0	
Pengembalian Tunj. Suami/Istri PPPK		-	
Jumlah Belanja	2.247.295.214	250.151.297	8,98

Lonjakan belanja pegawai PPPK memang sangat signifikan. Total belanja pegawai PPPK dari Rp. 250.151.297 pada tahun 2024 menjadi Rp. 2.247.295.214 pada tahun 2025. Merupakan kenaikan sebesar 8,98 kali lipat (900%). Kenaikan ini tidak mungkin terjadi hanya karena kenaikan gaji rutin. Melainkan konfirmasi nyata adanya penambahan jumlah personil dalam skala besar, pengakatan tenaga honorer menjadi PPPK.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang Rp
21,543,878,719

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 21,543,878,719 dan Rp 32,383,443,364; Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,58% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2025. Hal ini antara lain disebabkan oleh Meningkatnya realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar 29,13% dan belanja barang persediaan sebesar 28,74%

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER TA 2025	REALISASI 31 DESEMBER TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	5.010.612.373	8.602.860.984	(41,76)
Belanja Barang Non Operasional	1.947.922.930	2.130.493.230	(8,57)
Belanja Barang Persediaan	3.378.343.190	5.137.937.812	(34,25)
Belanja Jasa	2.341.774.402	3.665.917.203	(36,12)
Belanja Pemeliharaan	3.627.089.309	3.275.271.490	10,74
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.238.136.515	9.567.608.983	(45,25)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		3.353.662	
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.		-	
Jumlah Belanja Kotor	21.543.878.719	32.383.443.364	(33,47)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	21.543.878.719	32.383.443.364	-33,47

Tabel tersebut menunjukkan adanya langkah efisiensi anggaran yang sangat signifikan pada tahun 2025. Secara keseluruhan. Jumlah belanja turun sebesar 33,47%, dari Rp. 32,383,443,364 pada akhir tahun 2024 menjadi Rp. 21,543,878,719 pada akhir tahun 2025.

- Perjalanan dinas dalam negeri mengalami penurunan tajam sebesar 45,25% yakni berkurang sekitar Rp. 4,3M dari tahun sebelumnya.
- Perjalanan dinas luar negeri realisasi ditekan hingga nol (0) pada tahun 2025, dibandingkan tahun 2024 yang masih mencatatkan realisasi.

Analisa efisiensi penurunan ini menunjukkan pengetatan pengiriman personil ke luar kantor dialihkan ke koordinasi daring (virtual).

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja
Modal Rp 0;

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0; dan Rp 3,808,976,837; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024

URAIAN	REALISASI 31 Desember TA 2025	REALISASI 31 Desember TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3.433.789.050	-10000%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	4.673.484.626	-10000%
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian	-	0	
Jumlah Belanja	0	8.107.273.676	(100,00)

berdasarkan belanja modal terlihat adanya kebijakan efisiensi yang sangat ekstrem, di mana realisasi belanja modal pada tahun 2025 ditekan hingga titik nol. Pada tahun 2025 realisasi belanja modal adalah Rp. 0, turun 100% dibandingkan 2024 yang mencapai Rp. 8,107,273,676. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, instansi tidak melakukan pengadaan aset tetap baru sama sekali.

Seluruh pos belanja modal dihentikan untuk mendukung efisiensi anggaran.

- Belanja modal peralatan dan mesin turun dari Rp. 3,433,789,050 pada tahun 2024 menjadi Rp. 0 pada 2025 (turun 100%). Ini menandakan tidak adanya pembelian kendaraan, komputer, atau mesin kantor baru.
- Belanja modal gedung dan bangunan turun dari Rp. 4,673,484,626 pada 2024 menjadi Rp. 0 pada 2025 (turun 100%). Ini menunjukkan tidak adanya pengembangan gedung baru atau renovasi besar-besaran yang menambah nilai aset.

B.5 Belanja Modal Tanah

Realisasi Modal
Tanah Rp 0;

Tanah merupakan aset tetap yang mencakup seluruh lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama untuk digunakan dalam kegiatan operasional maupun

pelayanan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, aset tanah diakui berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Entitas tidak mencatatkan hak kepemilikan tanah secara mandiri di dalam neraca administratif, ini merupakan tanah pengelola, atau penyelenggara bandara angkasa pura pada masa itu.

B.6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Modal
Gedung dan
Bangunan Rp 0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0; dan Rp. 4,673,484,626; Dan Belanja Penambahan Nilai gedung dan Bangunan.

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Modal
Peralatan dan
Mesin Rp 0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0; dan Rp3,433,789,050; Dan Belanja Penambahan Nilai peralatan perlengkapan operasional kantor.

B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp 0

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.- dan Rp.0.

B.8 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Modal
Lainnya Rp 0

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0, dan Rp.0.

B.8 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi
Bantuan Rp 0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0 Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran Rp
0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0; dan Rp.0; yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP hal ini menunjukkan bahwa seluruh Uang Persediaan telah nihil atau telah di pertanggungjawabkan seluruhnya pada akhir periode.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	
2	Kas lain di Bendahara Pengeluaran	-	-	0
	Jumlah	-	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan Rp
0*

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang berada dibawah penguasaan Bendahara Penerima pada tanggal pelaporan, yang berasal dari penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah di setorkan ke kas Negara dengan mekanisme e-billing setiap transaksinya. Kondisi saldo Rp.0 di tahun 2025 (audited) dan 2024 mencerminkan kepatuhan terhadap entitas terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

1. Penyetoran tetap waktu;

Seluruh penerimaan PNBP yang dipungut oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama sepanjang tahun anggaran 2025 telah disetorkan seluruhnya ke kas Negara melalui mekanisme Simponi/MPN G3 sebelum tanggal penutupan buku.

2. Penerapan Zero Balance;

Tidak terdapat dana mengendap di rekening bendahara penerimaan pada periode berjalan di tahun pelaporan, sesuai dengan prinsip bahwa setiap rupiah pendapatan negara harus segera disetorkan ke kas negara pada kesempatan pertama.

3. Berdasarkan hasil verifikasi, saldo Rp. 0 ini telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi internal antara catatan bendahara penerimaan dengan laporan kinerja instansi dan aplikasi sistem informasi keuangan (Monsakti/SAKTI)

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Keterangan	30-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

C.3 Kas lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan Setara kas Rp 0

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup seluruh kas yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya bukan dari Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) komponen ini juga meliputi setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang memiliki likuiditas tinggi sehingga dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan tanpa resiko perubahan nilai yang signifikan.

Berdasarkan posisi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 nilai kas lainnya dan setara kas tercatat masing-masing sebesar Rp. 0 (nihil) penjelasan saldo ini menunjukkan;

- Tidak terdapat saldo kas yang berasal dari dana titipan pihak ketiga, dana jaminan, atau penerimaan lainnya yang bersifat non-budgeter pada tanggal pelaporan.
- Seluruh instrumen yang dikategorikan sebagai setara kas telah dicairkan atau telah mencapai masa jatuh tempo sebelum akhir periode pelaporan tahun anggaran 2025.
- Saldo ini menunjukkan konsistensi posisi keuangan yang sama dengan periode tahun sebelumnya (2024), yang mencerminkan tidak adanya aktivitas transaksi pada akun kas non-UP/TUP selama dua tahun berakhir.

Secara lebih rinci, komposisi saldo kas lainnya dan setara kas pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Kas Lainnya dan Setara Kas			0
	Jumlah	-	-	-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa sebagai imbal balik dari pelayanan yang telah diberikan kepada pihak lain, namun penyelesaian pembayarannya belum diterima hingga tanggal pelaporan.

Saldo sebesar Rp. 0 per 31 Desember 2025 (audited) mengindikasikan bahwa seluruh hak pendapatan negara dari jasa pelayanan telah tertagih secara penuh dan tidak terdapat tunggakan pembayaran dari pihak ketiga pada akhir periode pelaporan, kondisi mencerminkan pengelolaan piutang yang efektif serta siklus penagihan yang tepat waktu. Begitu halnya pada periode per 31 Desember 2004.

Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Piutang Bukan Pajak			0
	Jumlah	-	-	-

C.5 Piutang Bukan Pajak Lainnya (netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per tanggal 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. dan Rp. Piutang Bukan Pajak (Netto) merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak Lainnya (Netto)

Piutang Bukan Pajak Rp 0

Piutang Bukan Pajak Lainnya Rp 0

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Piutang Bukan Pajak (Netto)			0
	Jumlah	-	-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merepresentasikan nilai nihil tagihan ganti rugi negara yang telah ditetapkan dan diperkirakan akan jatuh tempo atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo nilai Rp. 0 pada akhir periode 2025 dan 2024 menunjukkan bahwa tidak ada terdapat piutang tuntutan perbendaharaan maupun ganti rugi yang sedang dalam proses angsuran lancar. Kondisi ini mencerminkan bahwa tidak ada beban kewajiban finansial dari pegawai atau bendahara atas kerugian negara yang harus ditagihkan pada periode berjalan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP / TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

C.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau

*Bagian Lancar
Tagihan
(TP/TGR) Rp 0*

*Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp 0*

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan An	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
tertagih Rp 0*

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piu	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

*Belanja dibayar
di Muka Rp 0*

C.9 Belanja diBayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Belanja Dibayar di Muka	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

Pendapatan yang masih harus diterima Rp 0

C.10 Pendapatan yang masih harus diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

No	Keterangan	31-Dec-24	31-Dec-23	%
1	Pendapatan yang Masih Harus Diter	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

C.11 Persediaan

Persediaan Rp 1,138,674,364

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 1,138,674,364; dan Rp 1,797,525,298; Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran persediaan dilakukan berdasarkan harga peroleh terakhir.

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
Barang Konsumsi	Rp 1.122.818.364,00	Rp 1.785.011.338,00
Barang untuk Pemeliharaan	Rp 15.856.000,00	Rp 12.513.960,00
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	Rp 1.138.674.364,00	Rp 1.797.525.298,00

Terjadi penurunan total nilai persediaan sebesar Rp. 658.850.934 pada akhir periode 2025 (audited) dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini secara signifikan dipengaruhi oleh pemanfaatan stok Barang Konsumsi yang efektif, di mana saldo kategori ini berkurang dari Rp.

1.785.011.338 menjadi Rp. 1.122.818.364. hal ini mengindikasikan manajemen logistik yang optimal dalam memenuhi kebutuhan operasional tanpa melakukan penumpukan stok yang berlebihan. Pengelolaan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama telah sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi Monsakti. Hal ini memastikan setiap mutasi barang, baik penambahan dari hasil pengadaan maupun pengurangan operasional, terakan secara real-time dan akurat. Konsistensi data antara catatan administratif dan kondisi fisik di gudang di jamin melalui prosedur rekonsiliasi internal secara berkala.

Gambar 1. Tabel Rincian Pembelian Persediaan
Periode Tahun Anggaran 2025 (audited)

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	2,561,942
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	305,400
1010301003	Penjepit Kertas	870,800
1010301004	Penghapus/Korektor	1,539,030
1010301006	Ordner Dan Map	1,666,943
1010301007	Penggaris	67,500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	372,300
1010301010	Alat Perekat	594,040
1010301011	Stadler HD	823,200
1010301014	Barang Cetakan	25,037,500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,631,398
1010302001	Kertas HVS	1,832,000
1010302002	Berbagai Kertas	1,895,256
1010302004	Amplop	4,406,260
1010302005	Kop Surat	23,643,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	1,041,467,300
1010304004	Tinta/Toner Printer	6,904,200
1010304006	USB/Flash Disk	2,383,600
1010306010	Batu Baterai	4,816,695
Jumlah Barang Konsumsi		1,122,818,364
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	240,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	7,406,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	8,210,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		15,856,000
TOTAL		1,138,674,364

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

Gambar 2. Tabel Rincian Pembelian Persediaan 2024
Periode Tahun Anggaran 2024 (audited)

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	3,687,025
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	315,400
1010301003	Penjepit Kertas	981,300
1010301004	Penghapus/Korektor	1,962,840
1010301006	Ordner Dan Map	1,989,468
1010301007	Penggaris	75,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	434,800
1010301010	Alat Perekat	769,320
1010301011	Stadler HD	999,600
1010301014	Barang Cetakan	32,537,500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,745,324
1010302001	Kertas HVS	13,397,500
1010302002	Berbagai Kertas	3,148,668
1010302004	Amplop	5,784,390
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	1,691,466,100
1010304004	Tinta/Toner Printer	15,750,678
1010304006	USB/Flash Disk	3,582,300
1010306010	Batu Baterai	6,384,125
Jumlah Barang Konsumsi		1,785,011,338
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	407,370
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	2,057,940
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	255,300
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	173,160
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	8,587,890
1010305012	Pengharum Ruangan	1,032,300
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		12,513,960
TOTAL		1,797,525,298

Persediaan yang belum diregister Rp 0

C.12 Persediaan yang belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0; dan Rp0; Rincian Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 (audited)
dan 31 Desember 2024

Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
Persediaan yang belum diregister		
Jumlah	-	-

Tagihan tuntutan perbendaharaan (TP/TGR) Rp 0

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara

untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP / TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/ TGR

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Tagihan TP/ TGR	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – P	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

Tagihan
penjualan
angsuran Rp 0

Penyisihan
piutang tak
terttagih Rp 0

C.16 Tanah

Tanah Rp 0

Berdasarkan laporan posisi keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, saldo aset tetap berupa tanah per tanggal 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0. saldo ini menunjukkan tidak adanya nilai buku tanah yang dicatatkan sebagai milik atau dalam penguasaan penuh entitas yang menghasilkan nilai pada neraca periode pelaporan tersebut. Status penggunaan aset lahan atau tanah yang digunakan untuk peri

Rincian Tanah

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Tanah	0	0	0
	Jumlah	-	-	-

C.17 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin Rp
106,113,677,725*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 106,113,677,725 dan 123,529,952,802; yang terdiri dari:

- Mutasi Tambah berupa saldo awal yang diperoleh dari koreksi aset Invancare Center Rp. 1.103.547.500, Komputer jaringan lainnya Rp. 4.569.261.073, Backdrop Rp. 497.280.000 dan koreksi pencatatan aset Antena Band Rp. 2.148.777.400;
- Mutasi kurang diperoleh dari hasil koreksi aset Invancare Center Rp. 2.896.547.500, komputer jaringan lainnya Rp. 11.405.525.000, Backdrop Rp. 497.280.000, koreksi pencatatan nilai berkurang dari Antena All Band, dan penghentian aset dari penggunaan untuk proses penghapusan 8.787.011.150;

Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Peralatan dan Mesin	106.113.677.725	123,529,952,802
	Jumlah	106.113.677.725	123,529,952,802

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Awal di Tahun 2025	123.529.952.802
Mutasi tambah:	8.318.865.973
Koreksi Saldo Awal bertambah	8.318.865.973
Hibah Barang	
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	-25.735.141.050
Transfer Keluar	
Koreksi Pencatatan	-14.799.352.500
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-2.148.777.400
Pengehentian Aset dari Penggunaan	-8.787.011.150
Penghapusan	
Saldo per 31 Desember 2025	106.113.677.725
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-98.043.347.306
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8.070.330.419

Penambahan saldo awal karena adanya koreksi dari pencatatan seperti Komputer dan jaringan. Surat Keterangan dari hasil verifikasi dan validasi dengan No. KET.00012 Tahun 2025.

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	CCTV Camera Control	Buah	4	581.680.000
2	Meja Kerja Kayu	Buah	4	188.715.120
3	Meja Rapat	Buah	2	16.610.000
4	Backdrop TV	Buah	2	497.280.000
5	AC Split	Buah	2	26.950.000
6	Uninterruptible power	Buah	11	703.484.100
7	Camera digital	Buah	1	13.835.800
8	Antena All band	Buah	11	2.745.637.395
9	TV Monitor	Buah	4	122.584.000
10	Kamera Digital	Buah	1	27.362.500
11	GPS	Buah	1	60.197.500
12	PC Unit	Buah	22	1.756.951.908
13	Laptop	Buah	5	97.366.500
14	Tablet PC	Buah	6	368.486.800
15	Printer	Buah	10	30.441.950
16	External/Portable Hardisk	Buah	2	3.283.500
17	Server	Buah	4	1.066.039.700
Penambahan Nilai Koreksi Saldo Awal				8.318.865.973

Koreksi pencatatan pada mutasi berkurang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	Backdrop TV/Wardrobe	Set	150	(497.280.000)
2	Infantcare Center	Buah	1	(2.896.547.500)
3	Komputer jaringan lainnya	Buah	1	(11.405.525.000)
Total Koreksi Pencatatan Mutasi Berkurang				(14.799.352.500)

Koreksi pencatatan nilai berkurang sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Antena All band	(2.148.777.400)

C.18 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah 25,413,266,767 dan 23,860,398,777 Rincian Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah diperoleh dari:
 1. Koreksi pencatatan komputer jaringan lainnya menjadi pengembangan gedung Kantor Permanen NUP 1 sebesar Rp. 625.606.850; koreksi KDP menjadi pengembangan gedung NUP 1 sebesar Rp. 99.844.500;
 2. Saldo awal hasil penilaian pengelolaan barang sebesar Rp. 844.236.000;
- b. Mutasi kurang diperoleh dari adanya pengembalian belanja atas pengembangan gedung TA 2024 sebesar Rp. 16.819.360;

Rincian Gedung dan Bangunan

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Gedung dan Bangunan	25.413.266.767	23.860.398.777	6,51
	Jumlah	25.413.266.767	23.860.398.777	6,51

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Gedung dan
bangunan Rp
25,413,266,767*

Saldo Nilai Awak di Tahun 2025	23.860.398.777
Mutasi tambah:	Rp 844.236.000
Transfer masuk	
Pengembangan Nilai Aset	
Perolehan Lainnya	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	725.451.350
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-Rp 16.819.360
Saldo per 31 Desember 2025	25.413.266.767
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5.172.641.796)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	20.240.624.971

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang bangunan Gedung Kantor Permanen Rp. (16.819.360);

C.19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan Rp 2,108,385,500

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,108,385,500; dan Rp2,112,785,500; Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.108.385.500	2.112.785.500	(0,21)
	Jumlah	2.108.385.500	2.112.785.500	(0,21)

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Januari 2025	2.112.785.500
Mutasi tambah:	-
	-
Mutasi kurang:	-
- Pengehentian Aset dari Penggunaan	(4.400.000)
Saldo per 31 Desember 2025	2.108.385.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.540.352.436)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	568.033.064

Pada periode sampai dengan 31 Desember TA 2025 tidak terdapat mutasi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan sehingga tidak menambah atau mengurangi nilai saldo 31 Desember TA 2024.

*Aset Tetap
Lainnya Rp
99,274,500*

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 99,274,500; dan Rp118,937,000; Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Aset Tetap Lainnya	99.274.500	118.937.000	(16,53)
	Jumlah	99.274.500	118.937.000	(16,53)

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	118.937.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	-19.662.500
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-19.662.500
Saldo per 31 Desember 2025	99.274.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	99.274.500

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp -*

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 353,813,600; dan 253,969,100;. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		353.813.600	(100,00)
	Jumlah	-	353.813.600	(100,00)

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	353.813.600
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
- Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	353.813.600
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Tidak terdapat Mutasi transaksi penambahan atau pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Kondisi saldo Rp. 0 pada akhir tahun 2025 mengindikasikan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi yang sebelumnya masih dalam proses pada tahun 2024 telah selesai ditangani menjadi koresksi pencatatan KDP.

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
penyusutan Aset
tetap Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember TA 2025 (audited)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	106.113.677.725	98.043.347.306	8.070.330.419
2	Gedung dan Bangunan	25.413.266.767	5.172.641.796	20.240.624.971
3	Jalan dan Jembatan	953.090.000	928.866.050	24.223.950
4	Irigasi	380.237.000	102.603.636	277.633.364
5	Jaringan	775.058.500	508.882.750	266.175.750
6	Aset Tetap dalam Renovasi			0
7	Aset Tetap Lainnya	99.274.500		99.274.500
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan			0
Total		133.734.604.492	104.756.341.538	28.978.262.954

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Aset Tak
Berwujud Rp
13,284,959,466**

C.23 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 13,284,959,466; dan Rp 5.027.333.289;

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, aset tak berwujud berupa

- Mutasi tambah di peroleh dari koreksi Invancare Center Rp. 1.793.000.000, Komputer Jaringan lainnya Rp. 6.210.657.077 dan koreksi hasil kajian Rp. 253.969.100;

Rincian Aset Tak Berwujud

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Aset Tak Berwujud	13.284.959.466	5.027.333.289	164,25
	Jumlah	13.284.959.466	5.027.333.289	164,25

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	5.027.333.289
Mutasi tambah:	8.257.626.177
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	13.284.959.466
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	13.284.959.466

Pada periode sampai dengan 31 Desember TA 2025 tidak terdapat mutasi terhadap Aset Tak Berwujud sehingga tidak menambah atau mengurangi nilai saldo.

C.24. Aset Lain-Lain

**Aset Lain-lain
Rp0**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0; dan Rp0 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Rincian Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Rincian Aset lain-lain

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Aset Lain-lain	-	
	Jumlah	-	-

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang: Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
(12,516,014,866)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp (12,516,014,866) dan Rp (4,512,357,789) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 31 Desember 2025

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	12.516.014.866	12.516.014.866	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	45.056.000		45.056.000
Dana yang Tidak dibatasi Pengerjaannya			
Hasil Kajian/Penelitian	723.888.600		723.888.600
Jumlah Aset Tak Berwujud	13.284.959.466	12.516.014.866	768.944.600
Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah			0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	13.284.959.466	12.516.014.866	768.944.600

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

C.26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0; Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka dari KPPN

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Uang Muka dari KPPN		-	-
	Jumlah	-	-	-

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0.; dan Rp1,861,554,175; Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Utang kepada Pihak Ketiga		1.861.554.175	-
	Jumlah	-	1.861.554.175	-

C.28 Hutang yang belum ditagihkan

Nilai hutang yang belum ditagihkan pada peridoe 31 Desember 2025 senilai Rp 0 dan 31 Desember 2024 senilai Rp0

Tabel utang yang belum ditagihkan

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Utang yang belum ditagihkan			-
	Jumlah	-	-	-

*Utang kepada
Pihak ketiga Rp 0*

*Hutang yang
belum
ditagihkan Rp0*

*Pendapatan
diterima dimuka
Rp 0*

C.29 Pendapatan diterima dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan diterima di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan diterima di Muka

No	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	%
1	Pendapatan diterima di Muka	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

C.30 Ekuitas

*Ekuitas Rp
30,885,881,918*

Ekuitas per 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 30,885,881,918 dan Rp. 34,238,701,353; Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNB
Rp. 21,130,345,431;*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.21,130,345,431 ; dan Rp 21,756,311,943; Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	169.259.636	116.132.943	45,75
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya			#DIV/0!
Pendapatan dari penjualan peralatan	296.237.000	1.194.000	24710,47
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	20.019.310.000	20.779.235.000	(3,66)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	615.900.000	859.750.000	(28,36)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000		
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	10.713.792		
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	16.819.360		
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.105.643		
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
Jumlah	21.130.345.431	21.756.311.943	(2,88)

- Ini merupakan pendapatan inti dari fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama meskipun secara nilai mengalami penurunan tipis sebesar 3,66% (dari Rp20.77M) pos ini tetap menjadi tulang punggung penerimaan dengan kontribusi mencapai 94% dari total PNB. Stabilitas pendapatan dari sektor jasa kebandarudaraan menunjukkan konsistensi layanan operasional penerbangan yang tepat terjaga sepanjang tahun anggaran 2025.
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan peningkatan ini mencerminkan keberhasilan entitas dalam optimalisasi pemanfaatan Aset Milik Negara (BMN) melalui kerjasama sewa dengan pihak ketiga yang lebih produktif dibandingkan tahun sebelumnya.

- Pendapatan jasa transportasi lainnya pos ini mengalami penurunan sebesar Rp. 28.36% menjadi Rp. 615.90Juta. Penurunan ini bersifat fluktuatif yang dipengaruhi oleh dinamika permintaan jasa layanan transportasi penunjang dilapangan selama periode berjalan.
- Pendapatan dari penjualan peralatan terdapat lonjakan nilai yang sangat besar dari hanya Rp. 1.19 juta di tahun 2024 menjadi Rp. 296.23 juta di tahun 2025. Kenaikan drastis ini pada pos ini berasal dari aktivitas pelepasan atau penjualan peralatan yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional.

D.2 Beban Pegawai

**Beban Pegawai Rp.
32,836,664,107;**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar 32,836,664,107; dan 28,305,327,579; Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember TA 2025	31 Desember TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	32.836.664.107	28.305.327.579	16,01
Jumlah	32.836.664.107	28.305.327.579	16,01

Beban Pegawai 31 Desember TA 2025 (audited) mengalami peningkatan sebesar 16.01% dari 31 Desember TA 2024, hal ini disebabkan oleh terdapat pegawai/mutasi dan CPNS gaji dan juga grade pegawai.

D.3 Beban Persediaan

**Beban Persediaan
Rp. 4,005,536,164;**

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 4,005,536,164; dan Rp. 3,639,546,258; Beban Persediaan merupakan

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	4.005.536.164	3.639.546.258	10,06
Jumlah	4.005.536.164	3.639.546.258	10,06

Beban Persediaan 31 Desember TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 10,06% dari 31 Desember TA 2024, hal ini disebabkan oleh peningkatan beban persediaan konsumsi.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,300,309,705; dan Rp. 14,523,423,457; Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember TA 2025	31 Desember TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.790.610.363	4.971.273.474	-43,87
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	167.750.000	930.105.200	-81,96
Beban Barang Operasional Lainnya	2.052.252.010	2.701.482.310	-24,03
Beban Bahan	1.947.922.930	2.103.793.230	-7,41
Beban Honor Output Kegiatan		26.700.000	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya			#DIV/0!
Beban Gedung dan Bangunan-Ekstrakomptabel		124.152.040	-100,00
Beban Langganan Listrik	1.367.967.042	1.942.147.029	-29,56
Beban Langganan Telepon			#DIV/0!
Beban Langganan Air	54.807.936	54.807.936	0,00
Beban Sewa	88.999.424	948.962.238	-90,62
Beban langganan Daya dan Jasa Lainnya	830.000.000	720.000.000	15,28
Jumlah	9.300.309.705	14.523.423.457	-35,96

*Beban Barang dan
Jasa Rp.
9,300,309,705;*

D.5 Beban Pemeliharaan

**Beban Pemeliharaan
Rp. 3,658,747,269;**

Beban Pemeliharaan 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,658,747,269; dan Rp3,311,992,155; Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban peningkatan sebesar 10,47% karena optimalisasi anggaran untuk pemeliharaan gedung bangunan dan persediaan bahan untuk pemeliharaan.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.528.605.658	755.728.605	102,27
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.098.483.651	2.519.542.885	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	31.657.960	36.720.665	(13,79)
Jumlah	3.658.747.269	3.311.992.155	10,47

D.6 Beban Perjalanan Dinas

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 5,238,136,515;**

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5,238,136,515; dan Rp.9,570,962,645;. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2025 (audited) dan 31 Desember TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5.238.136.515	9.567.608.983	(45,25)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			(100,00)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		3.353.662	0,00
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri			0,00
Jumlah	5.238.136.515	9.570.962.645	-45,27

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember TA 2025 (audited) mengalami Penurunan sebesar 45,27% dari 31 Desember TA 2024, hal ini disebabkan oleh beban perjalanan dinas biasa.

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2025 (audited) dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2025 (audited) dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4,346,669,251; dan Rp.4,023,015,209; Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember Tahun 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.173.441.802	3.544.410.697	(10,47)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	726.790.879	650.077.838	11,80
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	77.736.087	107.024.275	(27,37)
Beban Penyusutan Irigasi	12.071.016	12.071.016	-
Beban Penyusutan Jaringan	32.975.425	33.085.425	(0,33)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	-	-
	4.023.015.209	4.346.669.251	(7,45)
Beban Amortisasi Software			#DIV/0!
Beban Penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.023.015.209	4.346.669.251	(7,45)

*Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Rp. 0;*

*Beban Bantuan Sosial
Rp. 0;*

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp. 4,023,015,209;*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

**Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp. 0;**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11 Kegiatan Non Operasional

**Surplus /(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(78,515,094)**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pada periode 31 Desember 2025 (audited) dan periode 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp (78,515,094); dan Rp (6,581,270); Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 (audited) dan
31 Desember Tahun 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-78.515.094	-6.581.270	(71.933.824,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	296.237.000	1.194.000	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	374.752.094	7.775.270	
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu			
Penerimaan kembali belanja barang thn yg lalu			
Penerimaan kembali belanja modal thn lalu			
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa: Rp. 0;

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 (audited) dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA IV

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 512802 - KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 04/05/26 2:26

Kode Lap : shr_kppn_poc

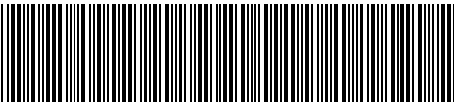
No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	81,797,823,000	81,797,823,000	0
2	Belanja	54,380,543,767	54,380,543,767	0
3	Pengembalian Belanja	-941	-941	0
4	Estimasi Pendapatan	33,125,180,000	33,125,180,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	21,130,345,431	21,130,345,431	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026





SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 022.05.2.512802/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 19
Tanggal : 15 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
- Sebesar : Rp. 81.797.823.000 (DELAPAN PULUH SATU MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.08 TRANSPORTASI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	60.997.823.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	20.800.000.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 81.797.823.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

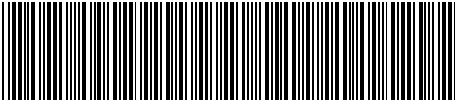
Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025

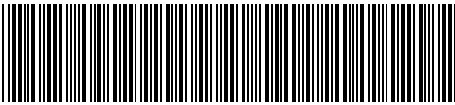


DS:2324-8511-5461-6945

Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	29.377.372.000
GA.1960	Pelayanan Transportasi Udara	Rp.	1.941.938.000
GA.4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Rp.	4.253.707.000
GA.4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	Rp.	15.631.526.000
GA.4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	Rp.	7.550.201.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	52.420.451.000
WA.4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Rp.	51.434.731.000
WA.4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	Rp.	383.662.000
WA.4614	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	Rp.	602.058.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
I A. INFORMASI KINERJA



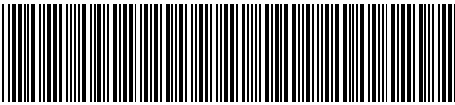
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : I A. 1

Program	:	022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			29.377.372.000
Kegiatan	:	1960	Pelayanan Transportasi Udara			1.941.938.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pelayanan Transportasi Udara			
		2. 02	Tingkat Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Bidang Angkutan Perintis Udara			
		3. 03	Tingkat Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Transportasi Udara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1960.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	24.057.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Angkutan Udara	1.00	NSPK	24.057.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1960.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	2,00	Layanan, Laporan	1.917.881.000
Rincian Output	:	01 BIF.001	Layanan Pengawasan Bidang Angkutan Udara	1.00	Layanan	1.200.233.000
		02 BIF.002	Layanan Pengendalian Bidang Angkutan Udara	1.00	Layanan	717.648.000
Kegiatan	:	4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara			4.253.707.000
	:	1. 01	Rasio Konektivitas Transportasi Udara			
		2. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			
		3. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Bandar Udara			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4645.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	25.000.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Bandar Udara	1.00	NSPK	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	4645.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	2,00	Layanan, Laporan	1.728.707.000
Rincian Output	:	01 BIF.001	Layanan Pengawasan Bidang Bandar Udara	1.00	Layanan	1.075.802.000
		02 BIF.002	Layanan Pengendalian Bidang Bandar Udara	1.00	Layanan	652.905.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
I A. INFORMASI KINERJA

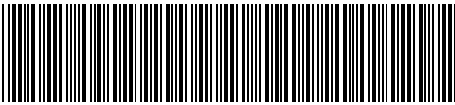


DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Pengawasan dan Pengendalian Layanan				Layanan, Laporan		
Klasifikasi Rincian Output	5	: 4645.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	1,00	Unit, Paket	300.000.000
Rincian Output		: 01 CAD.001	Peralatan Penunjang Bidang Bandar Udara	1.00	Unit	300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	: 4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1,00	unit, Paket	2.200.000.000
Rincian Output		: 01 CBE.004	Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	1.00	unit	2.200.000.000
Kegiatan		: 4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			15.631.526.000
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			
Klasifikasi Rincian Output	7	: 4646.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	110.869.000
Rincian Output		: 01 AFA.001	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Keamanan Penerbangan	1.00	NSPK	48.500.000
		: 02 AFA.002	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	1.00	NSPK	25.213.000
		: 03 AFA.003	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Kebijakan Bidang Navigasi Penerbangan	2.00	NSPK	37.156.000
Klasifikasi Rincian Output	8	: 4646.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	6,00	Layanan, Laporan	9.017.741.000
Rincian Output		: 01 BIF.001	Layanan Pengawasan Bidang Keamanan Penerbangan	1.00	Layanan	2.351.292.000
		: 02 BIF.002	Layanan Pengendalian Bidang Keamanan Penerbangan	1.00	Layanan	1.196.358.000
		: 03 BIF.003	Layanan Pengawasan Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	1.00	Layanan	1.308.213.000
		: 04 BIF.004	Layanan Pengendalian Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian	1.00	Layanan	2.132.441.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
I A. INFORMASI KINERJA

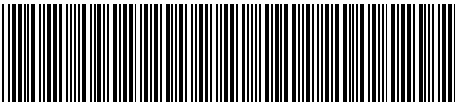


DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Pengawasan dan Pengendalian Layanan				Layanan, Laporan		
Pesawat Udara				1.00	Layanan	
05	BIF.005	Layanan Pengawasan Bidang Navigasi Penerbangan		1.00	Layanan	1.358.112.000
06	BIF.006	Layanan Pengendalian Bidang Navigasi Penerbangan		1.00	Layanan	671.325.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4646.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	2,00	Unit, Paket	6.502.916.000
Rincian Output		01	CAD.003 Peralatan Penunjang Bidang Keamanan Penerbangan	1.00	Unit	1.094.944.000
		02	CAD.007 Peralatan Penunjang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Navigasi Penerbangan	1.00	Unit	5.407.972.000
Kegiatan		4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara			7.550.201.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Rasio Konektivitas Transportasi Udara			
		2. 01	Tingkat Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			
		3. 02	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Bandar Udara			
Klasifikasi Rincian Output	10	4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	4,00	unit, Paket	7.550.201.000
Rincian Output		01	CDE.001 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	3.00	unit	6.950.201.000
		02	CDE.002 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Penunjang Kebandarudaraan	1.00	unit	600.000.000
Program		022.05.WA	Program Dukungan Manajemen			52.420.451.000
Kegiatan		4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara			51.434.731.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			
		2. 01	Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Udara			
		3. 02	Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Udara			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
I A. INFORMASI KINERJA

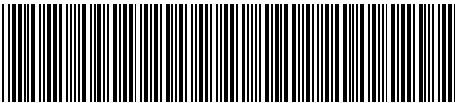


DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara						
	4.	04	Indeks Pengelolaan Keuangan			
	5.	05	Indeks Pengelolaan Aset			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan
		:	02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Layanan
		:	02	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan
Kegiatan		:	4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara		
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1.	01 Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Udara		
		:	2.	03 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Udara		
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Rincian Output		:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan
Kegiatan		:	4614	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara		
		:	1.	01 Indeks Kelembagaan		
		:	2.	01 Indeks Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Udara		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
I A. INFORMASI KINERJA

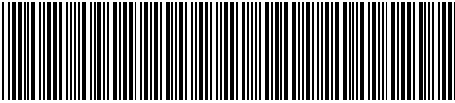


DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Klasifikasi Rincian Output	4	:	4614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	602.058.000	
Rincian Output		:	01	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	550.667.000
		:	02	EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	51.391.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
I B. SUMBER DANA



DS:2324-8511-5461-6945

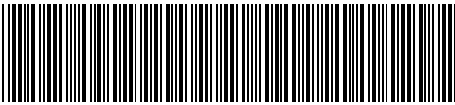
Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	81.797.823.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	60.997.823.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



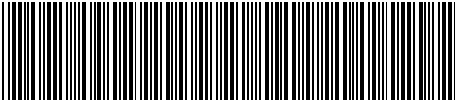
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512802	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I	32.920.510	40.074.397	8.802.916	-	-	81.797.823	01 . 51 133@ 133@	
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	20.574.456	8.802.916	-	-	29.377.372		
1960	Pelayanan Transportasi Udara	-	1.841.938	100.000	-	-	1.941.938		
1960.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	24.057	-	-	-	24.057		
04	PNBP	-	24.057	-	-	-	24.057		
1960.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.817.881	100.000	-	-	1.917.881		
01	RM	-	1.366.703	-	-	-	1.366.703		
04	PNBP	-	451.178	100.000	-	-	551.178		
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	-	1.853.707	2.400.000	-	-	4.253.707		
4645.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	25.000	-	-	-	25.000		
04	PNBP	-	25.000	-	-	-	25.000	133@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



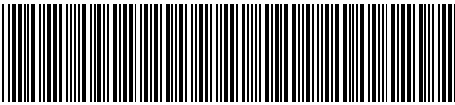
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10
4645.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.728.707	-	-	-	1.728.707	01 . 51	
01 RM		-	1.275.684	-	-	-	1.275.684	133@	
04 PNBP		-	453.023	-	-	-	453.023	133@	
4645.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	100.000	200.000	-	-	300.000	01 . 51	
04 PNBP		-	100.000	200.000	-	-	300.000	133@	
4645.CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	2.200.000	-	-	2.200.000	01 . 51	
04 PNBP		-	-	2.200.000	-	-	2.200.000	133@	
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	-	9.328.610	6.302.916	-	-	15.631.526		
4646.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	110.869	-	-	-	110.869	01 . 51	
04 PNBP		-	110.869	-	-	-	110.869	133@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



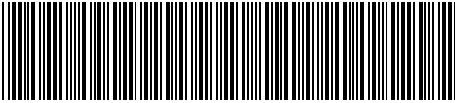
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4646.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.017.741	-	-	-	9.017.741	01 . 51	
	01 RM	-	5.934.985	-	-	-	5.934.985	133@	
	04 PNBP	-	3.082.756	-	-	-	3.082.756	133@	
4646.CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	200.000	6.302.916	-	-	6.502.916	01 . 51	
	04 PNBP	-	200.000	6.302.916	-	-	6.502.916	133@	
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara	-	7.550.201	-	-	-	7.550.201		
4647.CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.550.201	-	-	-	7.550.201	01 . 51	
	04 PNBP	-	7.550.201	-	-	-	7.550.201	133@	
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	32.920.510	19.499.941	-	-	-	52.420.451		
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	32.920.510	18.514.221	-	-	-	51.434.731		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
Kewenangan : (KD)

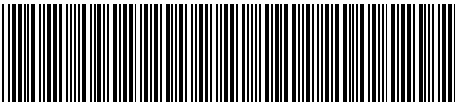
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	32.920.510	14.568.363	-	-	-	47.488.873	01 . 51	
	01 RM	32.920.510	14.568.363	-	-	-	47.488.873	133@	
4611.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.945.858	-	-	-	3.945.858	01 . 51	
	01 RM	-	3.945.858	-	-	-	3.945.858	133@	
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	-	383.662	-	-	-	383.662		
4613.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	383.662	-	-	-	383.662	01 . 51	
	01 RM	-	383.662	-	-	-	383.662	133@	
4614	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	-	602.058	-	-	-	602.058		
4614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	602.058	-	-	-	602.058	01 . 51	
	01 RM	-	602.058	-	-	-	602.058	133@	
JUMLAH		32.920.510	40.074.397	8.802.916	-	-	81.797.823		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



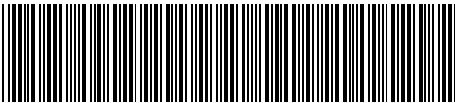
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	512802	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.243.326	3.336.741	5.536.065	3.339.754	3.230.409	5.832.061	3.652.149	4.089.338	4.508.358	6.003.621	5.094.416	34.931.585	81.797.823
		BELANJA PEGAWAI	1.967.345	2.089.173	4.343.638	2.135.078	2.093.946	4.427.214	2.472.893	2.532.982	2.556.169	2.639.813	2.575.633	3.086.626	32.920.510
		BELANJA BARANG	275.208	1.247.169	1.192.426	1.203.926	1.136.346	1.404.219	1.179.256	1.555.810	1.946.909	3.363.808	2.518.241	23.051.077	40.074.397
		BELANJA MODAL	772	399	0	751	117	628	0	546	5.279	0	541	8.793.882	8.802.916
		022.05.GA.1960 Pelayanan Transportasi Udara	52.014	34.752	0	37.135	55.375	57.024	44.602	55.817	89.805	66.000	82.139	1.367.274	1.941.938
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	51.242	34.354	0	36.384	55.258	56.395	44.602	55.271	84.526	66.000	81.598	1.276.308	1.841.938
		53 BELANJA MODAL	772	399	0	751	117	628	0	546	5.279	0	541	90.966	100.000
		022.05.GA.4645 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	7.640	0	20.394	16.271	16.337	25.283	32.598	5.637	53.138	78.586	265.420	3.732.403	4.253.707
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	7.640	0	20.394	16.271	16.337	25.283	32.598	5.637	53.138	78.586	265.420	1.332.403	1.853.707
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
		022.05.GA.4646 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	48.970	51.298	59.399	53.950	176.823	201.220	128.845	208.318	212.275	708.877	891.179	12.890.373	15.631.526
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	48.970	51.298	59.399	53.950	176.823	201.220	128.845	208.318	212.275	708.877	891.179	6.587.457	9.328.610
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.302.916	6.302.916
		022.05.GA.4647 Penunjang Teknis Transportasi Udara	0	0	199.345	394.478	195.000	394.156	394.856	537.827	633.565	1.069.957	258.071	3.472.947	7.550.201
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	199.345	394.478	195.000	394.156	394.856	537.827	633.565	1.069.957	258.071	3.472.947	7.550.201
		022.05.WA.4611 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	2.134.171	3.240.205	5.256.927	2.833.420	2.762.474	5.120.506	3.049.416	3.241.847	3.483.960	4.035.531	3.450.575	12.825.698	51.434.731
		51 BELANJA PEGAWAI	1.967.345	2.089.173	4.343.638	2.135.078	2.093.946	4.427.214	2.472.893	2.532.982	2.556.169	2.639.813	2.575.633	3.086.626	32.920.510

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (512802) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
022.05.WA.4613		52 BELANJA BARANG DAN JASA	166.826	1.151.031	913.289	698.343	668.528	693.292	576.523	708.866	927.791	1.395.717	874.942	9.739.073	18.514.221
		Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara	0	2.120	0	4.500	24.400	14.186	0	30.630	6.897	15.509	47.674	237.745	383.662
022.05.WA.4614		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	2.120	0	4.500	24.400	14.186	0	30.630	6.897	15.509	47.674	237.745	383.662
		Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara	530	8.366	0	0	0	19.685	1.833	9.262	28.717	29.162	99.358	405.145	602.058
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	530	8.366	0	0	0	19.685	1.833	9.262	28.717	29.162	99.358	405.145	602.058
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.430	2.760.450	33.125.180
		- PNBP (425131)	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.048	5.052	60.580
		- PNBP (425516)	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.466	2.722.474	32.669.600
		- PNBP (425519)	32.916	32.916	32.916	32.916	32.916	32.916	32.916	32.916	32.916	32.916	32.916	32.924	395.000

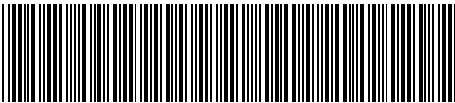
Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

ttd.

LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
IV A. B L O K I R



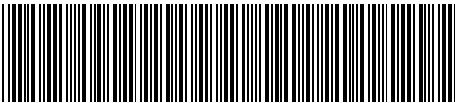
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [512802] KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
512802	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 27.240.771		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000
	52 Belanja Barang Rp. 18.437.855		Kebijakan Efisiensi
	53 Belanja Modal Rp. 8.802.916		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
1960	Pelayanan Transportasi Udara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 587.715
1960.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.067		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Kebijakan Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.254
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.990		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Kebijakan Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 204.450
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Efisiensi
1960.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.752		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.619	4645.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	Kebijakan Efisiensi		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.095
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)		Kebijakan Efisiensi
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Efisiensi		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.905
			Kebijakan Efisiensi

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
IV A. B L O K I R



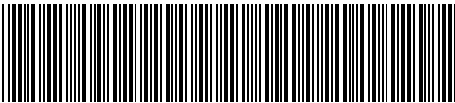
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [512802] KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4645.BIF	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4645.CAD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pengawasan dan Pengendalian Layanan		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 195.594
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000		Kebijakan Efisiensi
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Sarana Bidang Konektivitas Udara
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000
4645.CBE	Kebijakan Efisiensi	4645.CBE	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Prasarana Bidang Konektivitas Udara
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.406		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.200.000
	Kebijakan Efisiensi		Kebijakan Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.000		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
	Kebijakan Efisiensi		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.130
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Kebijakan Efisiensi
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 542.845		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4646.AFA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4646.BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 347.119
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 136.411		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
IV A. B L O K I R



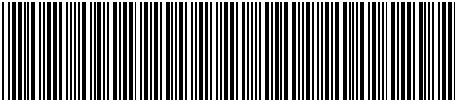
DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [512802] KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4646.CAD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	022.05.WA 4611 4611.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.781.231
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.692.958		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Program Dukungan Manajemen
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 144.014		521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.675.285
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 97.200		521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)
	Kebijakan Efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Efisiensi
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4647	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.682.286		521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Efisiensi
	Sarana Bidang Konektivitas Udara		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 571.200
	Kebijakan Efisiensi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.302.916		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000
4647.CDE	Kebijakan Efisiensi		Kebijakan Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4647.CDE	Penunjang Teknis Transportasi Udara		522141 Belanja Sewa(RM)
	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 688.620
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
IV A. B L O K I R



DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [512802] KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

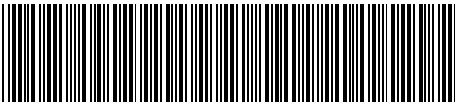
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4611.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4613.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.634.726		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.304
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Efisiensi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 509.982		521211 Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 876.675		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
4614.EBA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4614	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.386
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Efisiensi
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.925		Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara
	Kebijakan Efisiensi		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	522141 Belanja Sewa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 146.634
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.076		Kebijakan Efisiensi
	Kebijakan Efisiensi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.700		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4614.EBA	Kebijakan Efisiensi	4614	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.554
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 325.147		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4614.EBA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4614	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 325.147		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 022.05.2.512802/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2324-8511-5461-6945

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [05] Ditjen Perhubungan Udara
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [512802] KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Perhubungan
Dirjen Perhubungan Udara

ttd.
LUKMAN F. LAISA
NIP. 196803061993031001